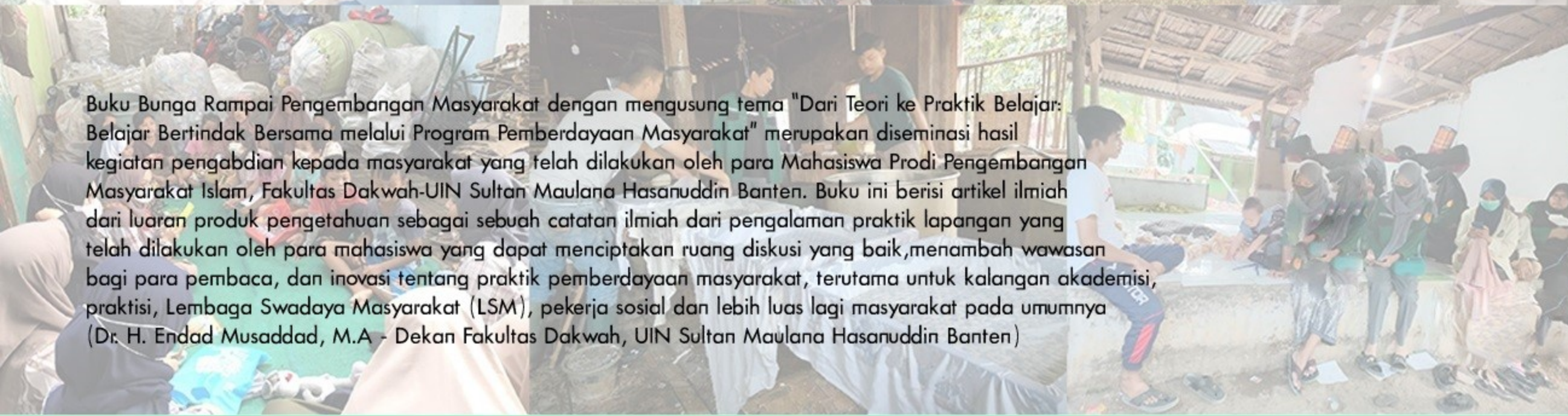




Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten

BUNGA RANPAI

PENGEMBANGAN MASYARAKAT



Buku Bunga Rampai Pengembangan Masyarakat dengan mengusung tema "Dari Teori ke Praktik Belajar: Belajar Bertindak Bersama melalui Program Pemberdayaan Masyarakat" merupakan diseminasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh para Mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah-UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku ini berisi artikel ilmiah dari luaran produk pengetahuan sebagai sebuah catatan ilmiah dari pengalaman praktik lapangan yang telah dilakukan oleh para mahasiswa yang dapat menciptakan ruang diskusi yang baik, menambah wawasan bagi para pembaca, dan inovasi tentang praktik pemberdayaan masyarakat, terutama untuk kalangan akademisi, praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pekerja sosial dan lebih luas lagi masyarakat pada umumnya (Dr. H. Endad Musaddad, M.A - Dekan Fakultas Dakwah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)

Buku yang ada di tangan para pembaca ini, merupakan catatan ilmiah setiap pengalaman para mahasiswa Program Studi (Prodi) Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten saat Praktikum Profesi Lapangan (PPL. Harapannya, kehadiran buku ini selain bagian dari tradisi kampus dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama tema yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan turut serta menciptakan ruang diskusi dan inovasi gagasan bagaimana metode pemberdayaan masyarakat yang efektif sehingga dapat memecahkan problem sosial dan ekonomi, serta ikut menumbuhkan kehidupan di masyarakat. (Eneng Purwanti M.A - Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)

Dari Teori Ke Praktik:

Belajar Bertindak Bersama Melalui Program Pengembangan Masyarakat



E-ISBN 978-623-351-504-7 (PDF)

Diterbitkan oleh Penerbit Nas Media Pustaka
Anggota IKAPI (No. 018/SSL/2018)
Jl. Tajem Baru No. 11, Yogyakarta 55281
www.nasmediapustaka.co.id

BUNGA RAMPAI PENGEMBANGAN MASYARAKAT
“Dari Teori ke Praktik: Belajar Bertindak Bersama melalui
Program Pemberdayaan Masyarakat”

Editor:

Muhammad Syafar, M.Kesos.

Penelaah:

Dr. Helmy Faizi Bahrul Ulumi, M.Hum

Dr. Ayatullah Humaeni, MA

Dr. Yanwar Pribadi, MA

Eneng Purwanti, M.A

Azizah Alawiyah, M.A

Gian Nova Sudrajat Nur, M.Hum

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Dakwah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

2022

BUNGA RAMPAI PENGEMBANGAN MASYARAKAT

“Dari Teori ke Praktik: Belajar Bertindak Bersama melalui Program Pemberdayaan Masyarakat”

Pengarah:

Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin., M.Pd

Penanggung Jawab:

Dr. H. Endad Musaddad, M.A

Editor:

Muhammad Syafar, M.Kesos.

Penata Isi dan Desainer Sampul:

Fahmi

Rizky Dita Sari

Ranu Mahesti

Muhammad Ikhsan Abdulrahman

Alwansyah Rifa'i

Nizar Alwan

Abdul Hafidz

Riyandi Hermawan

Gheby Amali Widiyah

M. Hafidz Kamaludin

Publikasi:

Kaherul Anam, M.Si

SEPATAH KATA
KETUA PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH, UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Alhamdulillah Segala puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan buku Bunga Rampai Pengembangan Masyarakat “Dari Teori ke Praktik: Belajar Bertindak Bersama melalui Program Pemberdayaan Masyarakat” yang diinisiasi oleh Program Studi (Prodi) Pengembangan Masyarakat Islam.

Buku ini merupakan produk pengetahuan dari serangkaian kegiatan Praktikum Profesi Lapangan (PPL) yang dilaksanakan setiap tahun oleh Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Laporan akhir Mahasiswa setelah dari lapangan adalah selain membuat artikel, sebagian dari mereka juga mempublikasikannya. Sudah seyogyanya, bagi mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam bahwa ruang belajar mereka bukan hanya di kampus melainkan di lapangan, bertemu, berinteraksi langsung dengan masyarakat, memahami bagaimana keadaan sosiologis dan budaya pada sebuah masyarakat, serta setiap problematikanya. Sehingga, mahasiswa terbiasa untuk berpikir kritis, dan solutif terhadap setiap problematika masyarakat.

Buku yang ada di tangan para pembaca ini, merupakan catatan ilmiah setiap pengalaman mahasiswa saat praktik di lapangan, yang dipresentasikan secara paralel pada 11 Januari 2022 lalu. Harapannya, kehadiran buku ini selain bagian dari tradisi kampus dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama tema yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan turut serta menciptakan ruang diskusi dan inovasi gagasan bagaimana metode pemberdayaan masyarakat yang efektif sehingga dapat memecahkan problem sosial dan ekonomi, serta ikut menumbuhkan kehidupan di masyarakat.

Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih banyak atas kolaborasi dari semua pihak yang ikut mensukseskan terbitnya buku Bunga Rampai Pengembangan Masyarakat “Dari Teori ke Praktik: Belajar Bertindak Bersama melalui Program Pemberdayaan Masyarakat”, terutama bagi para dosen, mahasiswa dan terkhusus untuk lembaga pengembangan masyarakat, yaitu: Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (Laz Harfa), *Waste Hub Solution*, Yatim Mandiri, Kandank Jurang Doang, Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jakarta Barat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Cikolelet-Banten, Rumah Edukasi dan Literasi Al-Qur’an (ReliQ) yang telah memberikan ruang kepada mahasiswa mengenalkan bagaimana praktik pemberdayaan masyarakat yang efektif. Sekali lagi, harapannya mudah-mudahan kehadiran buku ini dapat mewujudkan atmosfer pengabdian berbasis riset yang kokoh, berkelanjutan dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan dan sangat dimungkinkan untuk melakukan perubahan jika didalamnya ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kritik dan saran akan kami terima dengan senang hati demi tercapainya kesempurnaan penyusunan buku ini.

Serang, 16 Januari 2022

ttd.

Eneng Purwanti. M.A

SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS DAKWAH
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Puji dan syukur berlimpah patut kita haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, telah terbit buku Bunga Rampai Pengembangan Masyarakat “Dari Teori ke Praktik: Belajar Bertindak Bersama melalui Program Pemberdayaan Masyarakat” oleh Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Fakultas Dakwah-UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Buku ini merupakan diseminasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh Mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah-UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tema tersebut merupakan representasi semangat mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam untuk belajar secara langsung, berinteraksi dengan keberagaman masyarakat, sehingga mahasiswa bukan hanya menguasai secara teori tapi memahami bagaimana kondisi sesungguhnya setiap aspek masalah social, budaya dan ekonomi pada sebuah masyarakat.

Buku ini berisi artikel ilmiah dari luaran kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dipresentasikan oleh para mahasiswa Prodi PMI. Harapannya, sebagai sebuah catatan ilmiah dari pengalaman praktik lapangan yang telah dilakukan oleh mahasiswa sehingga buku ini dapat menciptakan ruang diskusi yang baik, menambah wawasan bagi para pembaca, dan inovasi tentang praktik pemberdayaan masyarakat, terutama untuk kalangan akademisi, praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pekerja sosial dan lebih luas lagi masyarakat pada umumnya.

Terakhir, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini, dan terimakasih banyak atas kolaborasi semua pihak, para dosen dan mahasiswa, terkhusus untuk lembaga pengembangan masyarakat, yaitu: Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (Laz Harfa), *Waste Hub Solution*, Yatim Mandiri, Kandank Jurang Doang, Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jakarta Barat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Cikolelet-Banten, Rumah Edukasi dan Literasi Al-Qur'an (ReliQ) yang telah membimbing dan mendampingi mahasiswa Prodi PMI. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan kepada kita semua atas apa yang telah kita lakukan selama ini. Sekali lagi, selamat berdinamika dan berbagi. Saya menantikan publikasi berikutnya yang diproduksi oleh Fakultas Dakwah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 17 Januari 2022

ttd.

Dr. H. Endad Musaddad, M.A

PENDAHULUAN: MEMAHAMI PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT

Muhammad Syafar¹⁾

¹⁾Program Studi PMI, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: m.syafar@uinbanten.ac.id

A. Latar Belakang

Sepanjang sejarah Indonesia dari orde lama sampai pada orde reformasi telah mengalami ujian dan tantangan dalam menjalani pembangunan nasional sesuai dengan cita-cita bangsa. Ujian dan tantangan tersebut bukan hanya datang dari faktor internal, tetapi juga faktor eksternal (Mustikawati, 2017). Pada tahun 1950-1960-an terjadi tarik-menarik pengaruh aliansi barat dan timur dalam perang dingin yang secara langsung mempengaruhi kondisi pembangunan nasional Indonesia. Pada saat itu, pembangunan habis “terkurus” pada pembangunan politik, sedangkan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya hanya mengikuti perkembangan politik dalam negeri. Suwarsono dan So (1994: 7) menjelaskan bahwa modernisasi hadir sebagai salah satu upaya pertarungan antar ideologi, sehingga Amerika Serikat sebagai salah satu kekuatan dunia berusaha memperluas pengaruh politiknya di banyak negara baru merdeka, seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Negara-negara ini secara serempak mencari model- model pembangunan yang hendak digunakan sebagai contoh untuk membangun ekonominya dan dalam usaha mempercepat pencapaian kemerdekaan sosial politiknya.

Setiap masalah-masalah sosial yang terjadi di Indonesia, sebagian belum cakap ditanggulangi dengan cepat dan tepat oleh negara (Huraerah, 2008). Persoalan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, jaminan kesehatan, dan bahkan isu sosial yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia belum cermat ditanggulangi secara cepat dan tuntas. Negara dalam hal ini adalah pemerintah yang memiliki otoritas penuh terhadap stabilitas nasional, cenderung memberikan solusi terbatas pada sektor

tertentu tanpa menggali lebih dalam akar permasalahan untuk memperoleh solusi yang komprehensif, sehingga sampai saat ini masih menyisakan isu sosial di level komunitas. Padahal Indonesia sebagai bangsa besar namun terlihat masih memiliki keterbatasan dalam memecahkan masalah-masalah sosial di dalam negeri (Mahsyar, 2011).

Pada umumnya, masalah sosial yang terjadi di Indonesia dan keterbatasannya dalam menyelesaikan masalah sosial tersebut, salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya keserasian pembangunan sosial yang sejalan dengan pembangunan nasional lainnya. Dalam era pembangunan saat ini, ukuran pertumbuhan suatu negara diukur oleh pembangunan ekonomi yang pesat dengan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Syofya, 2018). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula pendapatan negara yang diperoleh, yang hasilnya akan “ditetes ke bawah” (*trickle down effect*) dalam bentuk distribusi, membuka lapangan pekerjaan, dan mengatasi kemiskinan. Seakan-akan kebijakan ekonomi menjadi “dewa” penyelamat bagi kesuksesan pembangunan nasional. Padahal dalam realitanya, berbagai peristiwa sosial seperti kerusuhan sosial Mei 1998 merupakan akibat dari krisis ekonomi yang melanda bangsa ini, yang berdampak pada krisis multidimensi. Oleh karena itu, Midgley (2005: 5) menyebutnya sebagai pembangunan yang terdistorsi, yaitu pembangunan ekonomi tidak sejalan dengan pembangunan sosial. Artinya adalah kebijakan ekonomi belum diiringi dengan kebijakan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kebijakan sosial merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam pembangunan nasional, serta menjadi bagian dari tujuan pembangunan internasional. Strategi perkembangan internasional dari Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dalam menekankan hal ini sebagai berikut: Tujuan pokok pembangunan hendaknya menghasilkan kemajuan dalam kesejahteraan individu secara terus-menerus dan memberikan manfaat bagi keseluruhan. Apabila tetap berlangsung adanya hak-hak istimewa yang tidak semestinya, kekayaan yang melimpah dan ketidakadilan sosial, maka perkembangan gagal dalam tujuannya yang esensial. perubahan kualitatif dan

struktural dalam masyarakat harus bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, dan perbedaan yang ada – regional, sektoral, dan sosial – pada pokoknya harus dikurangi. Tujuan ini adalah faktor menentukan serta hasil akhir perkembangan; keduanya ini akan dipandang sebagai bagian yang berkaitan dari proses dinamis yang sama dan menghendaki pendekatan yang mempersatukan (Marsden, 1984: 12). Strategi ini dibuat sebagai kritik terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya ukuran kemajuan negara tanpa melibatkan kemajuan sosial.

Mengingat pentingnya pembangunan sosial sebagai pelengkap kemajuan suatu bangsa, maka dibutuhkan pembangunan politik, ekonomi, dan budaya yang berjalan bersama-sama. Setiap kebijakan yang dibuat pasti melalui mekanisme politik, dan seharusnya kebijakan politik harus berpihak pada kemajuan sosial. Begitu juga dengan kebijakan ekonomi, bahwa transaksi ekonomi tidak dapat berjalan tanpa adanya pelaku-pelaku ekonomi, yang pada hakekatnya adalah manusia. Jika kebijakan ekonomi tidak berpihak pada pelakunya, maka pelakunya tersebut akan termarginalkan dan mengakibatkan kemiskinan. Sehingga terjadi “jurang” pemisah yang jelas antara orang yang kaya dengan yang miskin.

Dalam mencapai pembangunan sosial, kebijakan sosial yang dibuat melalui proses politik bisa menjadi perhatian yang lebih serius jika dibandingkan dengan pembuatan kebijakan ekonomi. Padahal jika dilihat lebih jauh, sebenarnya kemajuan sosial sangat mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Pada dasarnya, Manusia-manusia yang terlibat dalam transaksi ekonomi, minimal membutuhkan 3 (tiga) kebutuhan dalam hidupnya, yaitu: pangan, pekerjaan, dan kesehatan. Ketiga kebutuhan mendasar ini merupakan kebutuhan mendasar dan saling terkait satu sama lain, dan memiliki hubungan timbal balik. Kebutuhan ini akan bisa terpenuhi melalui kebijakan negara yang memperhatikan kebutuhan masyarakatnya, melalui program-program yang jelas mengenai kelompok sasaran yang menjadi target pemberdayaannya. Untuk itu, ketiga kebutuhan inilah yang menjadi perhatian dalam merumuskan kebijakan sosial, dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial dalam

pembangunan sosial. Tulisan ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi pembangunan nasional Indonesia yang semula mengarah pada pembangunan ekonomi berubah ke arah pembangunan sosial, perubahan ini merupakan dampak globalisasi khususnya di negara-negara yang sedang berkembang; 2) mengidentifikasi pembangunan sosial mempengaruhi cakupan kebijakan, yaitu: pertimbangan luas lingkup kebijakan sosial; 3) mengidentifikasi pembangunan berbasis masyarakat yang merupakan salah satu pilihan dalam kebijakan pembangunan

B. Tinjauan Pustaka

Marsden (1984: 40) menjelaskan bahwa konsep pembangunan adalah fundamental dalam setiap diskursus kebijakan sosial di dunia ketiga, meskipun digunakan secara luas, istilahnya amat sering kali tidak diberi batasan dengan sesuatu yang teliti secara lengkap dan jelas sebagai pola perubahan yang progresif terhadap model yang diidam-idamkan oleh masyarakat barat. Sebagai negara yang masuk dalam sistem dunia, Indonesia menjadi sasaran bagi negara-negara maju dalam memperluas pengaruh ekonomi politiknya. Membuka peluang-peluang ekonomi dengan menjanjikan pertumbuhan pembangunan yang tinggi, yang bisa bersaing dengan masyarakat dunia lainnya. Namun dalam strategi pembangunan PBB, peran-peran ekonomi politik negara maju mendapat kritik yang tajam, dimana PBB memiliki prinsip bahwa untuk memajukan masyarakat dunia dibutuhkan perhatian pada kemajuan sosial diiringi dengan kemajuan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Midgley (2005: 37) mendefinisikan pembangunan sosial sebagai sebuah proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk menyeluruh dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Definisi tersebut berarti bahwa fokus pembangunan sosial adalah perubahan sosial yang direncanakan sejalan dengan pembangunan ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penekanan dalam

konsep pembangunan sosial berfokus pada masyarakat yang lebih luas, dengan mengintegrasikan pengembangan ekonomi sebagai sebuah proses pembangunan yang komprehensif dan universal. Sehingga kebijakan-kebijakan atau program-program sosial ekonomi yang dibuat untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan sosial dan ekonomi bukanlah dua hal yang terpisah. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam proses pembangunan, sebab kebijakan ekonomi tidak akan tercapai tanpa keikutsertaan kebijakan sosial yang baik, begitu juga sebaliknya. Menurut Mkandawire (2004: 1) mendefinisikan kebijakan sosial “*is collective interventions in the economy to influence the access to and the incidence of adequate and secure livelihoods and income. As such, social policy has always played redistributive, protective and transformative or developmental roles.*” Dalam pengertian ini, kebijakan sosial merupakan suatu intervensi kolektif dalam perekonomian untuk memberikan akses yang baik, kondisi hidup yang memadai, jaminan kehidupan, dan pendapatan. Bentuk kebijakan sosial seperti, redistribusi, jaminan sosial, pelayanan sosial, dan program-program kesejahteraan sosial lainnya.

Sumodiningrat (1999: 200) menjelaskan bahwa kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat dapat dipilah menjadi 3 (tiga), yaitu: pertama, kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi rakyat. Kedua, Kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. Ketiga, kebijakan khusus menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus. Kebijakan pemberdayaan masyarakat ini penting untuk dirumuskan untuk sebagai proses berjalannya program yang efektif.

Untuk itu, penulis mencoba untuk menghubungkan istilah pembangunan sosial dengan pembangunan ekonomi dalam proses pembangunan nasional. Definisi pembangunan sosial yang dijelaskan oleh Midgley di atas, menjelaskan bahwa bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dengan menghubungkannya pada

proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Dalam mencapai pembangunan sosial yang komprehensif dan universal, dibutuhkan suatu kebijakan sosial yang dapat menjadi arahan dan juga kebutuhan bagi pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, merupakan suatu strategi yang efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, supaya program yang dijalankan dapat tercapai mengenai kelompok sasaran. Sehingga keberhasilan dalam menjalankan upaya kesejahteraan sosial, tidak hanya berdasarkan ukuran kuantitatif saja, tetapi juga berlandaskan pada partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkarakter dan berkeadilan.

C. Pembahasan

1. Perubahan Pembangunan Ekonomi ke Arah Pembangunan Sosial

Pembangunan dapat dikatakan kompleks disebabkan oleh banyaknya sudut pandang yang menjadi perhatian dalam menganalisa dan membuat perencanaan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, ukurannya yang begitu luas dan cenderung dinamis memungkinkan perencanaan tersebut sulit diukur dalam mencapai keberhasilannya dalam pembangunan. Seperti yang dijelaskan Marsden (1984: 22) bahwa ‘pembangunan’ adalah konsep yang rumit dan tidak mudah dipahami, namun jelas fundamental dalam diskusi manapun membahas strategi kebijakan, tetapi lebih sering daripada dikatakan tidak ditentukan batasannya.

Pembangunan merupakan kunci bagi kemajuan suatu negara dengan berlandaskan pada cita-cita nasional (Syafar, 2015). Atas dasar itu, pelaksanaan pembangunan harus melibatkan seluruh aspek yang terintegrasi dan kolektif, tidak bisa hanya memfokuskan pada salah satu pembangunan saja, baik pembangunan ekonomi, sosial, politik, atau budaya. Jika kemajuan suatu negara hanya berfokus pada pembangunan ekonomi saja, maka akan terjadi ketimpangan yang tajam antara pembangunan yang satu dengan yang lain. Sehingga akan terbentuk “jurang” yang mencerminkan

kegagalan suatu negara dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional yang seutuhnya.

Sebagian negara di era milenium ini masih ada yang memfokuskan diri pada pembangunan ekonomi saja. Sebab satu-satunya untuk mengukur kemajuan suatu negara adalah dengan melihat pertumbuhan ekonomi, dengan melihat secara kuantitatif pendapatan perkapita penduduknya, atau dengan melakukan kebijakan moneter dengan menguatkan nilai tukar (kurs), mempertahankan suku bunga (interest rate), dan mengelola kebijakan fiskal. Namun, pembangunan yang fokus pada pelaku ekonomi (manusia) tersebut hanya dijadikan aset ekonomi saja. Hasilnya, pembangunan menjadi terdistorsi ditandai ketimpangan ekonomi yang menyebabkan kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya.

Midgley (2005: 5) menjelaskan bahwa pembangunan yang terdistorsi ini terjadi pada masyarakat dimana pembangunan ekonomi tidak sejalan dengan pembangunan sosial. Banyak negara yang mengalami kegagalan karena belum mampu melaksanakan pembagian keuntungan dari hasil pertumbuhan ekonomi tersebut, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata belum bisa memberikan “tetesan ke bawah” (*trickle down effect*) kepada masyarakat miskin. Disinilah letak kegagalannya, bahwa pembangunan terdistorsi memberikan pelajaran yang berharga bagi negara-negara “penganut” pembangunan, termasuk Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar dari kegagalan, dan bisa memperbaikinya agar tidak menjadi bangsa yang memiliki sejarah suram. Sehingga dibutuhkan jalan baru sebagai model atau pola pembangunan yang berkeadilan.

Prasyarat pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Jadi, arah pembangunan nasional pada dasarnya melibatkan seluruh aspek dalam sistem pembangunan, dan berjalan satu sama lain dengan mengedepankan rakyat sebagai subyek pembangunan tersebut. Pembangunan ekonomi harus sejalan dengan

pembangunan sosial, dan sebaliknya agar tidak terjadi distorsi dalam pembangunan, yang mengakibatkan ketimpangan sosial ekonomi yang tinggi. Sajogyo & Martowijoyo (2005: 228) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional Indonesia adalah pembangunan ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi berbasis kekeluargaan yang berasaskan daulat rakyat dan asas moral dengan pemihakan pada sektor ekonomi rakyat. Partisipasi rakyat sebagai pelaku pembangunan harus dilibatkan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, sehingga kebijakan dan strategi nasional yang dibuat mampu menghapus kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya.

Untuk melihat keterkaitan dengan mudah antara kebijakan sosial dan ekonomi, perlu memahami konstruksi kebijakan sosial dan ekonomi (Anggara, 2014). Cluster Ekonomi terdiri dari; kebijakan fiskal, suku bunga, nilai tukar, dan anggaran belanja. Sedangkan cluster sosial, yaitu; peluang usaha, proteksi, jaminan sosial, dan pelayanan sosial. Antara cluster sosial dan ekonomi terdapat cluster perkembangan (developmental) sebagai jalan tengah mempertemukan ranah sosial dan ekonomi. Cluster perkembangan terdiri dari; visi/*leadership* pengambil kebijakan, pemberdayaan masyarakat, kemajuan teknologi informasi, dan pengelolaan keamanan tanah. Cluster perkembangan seperti menjadi “obat” untuk mempertemukan kebijakan sosial dan ekonomi yang sulit dijalankan secara beriringan. Kebijakan pemerintah terkait dengan membuka kesempatan kerja bagi rakyat agar bisa memiliki penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, merupakan strategi kepemimpinan dalam mengatasi pengangguran. Begitu juga, dengan memberikan bantuan, asuransi sosial, dan membuka peluang-peluang usaha bagi rakyat kecil merupakan strategi pemberdayaan masyarakat mencapai perkembangan kesejahteraan sosial. Jadi, konstruksi kebijakan sosial dan ekonomi yang sejalan beriringan merupakan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang kompleks dan memerlukan sejumlah strategi untuk mencapainya.

2. Pembangunan Sosial Mempengaruhi Pertimbangan Luas Lingkup Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial merupakan suatu intervensi kolektif dalam perekonomian untuk memberikan akses sosial kepada masyarakat. Akses sosial tersebut antara lain; jaminan kesehatan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, peluang-peluang ekonomi, dan program-program sosial lainnya. Krisis ekonomi tahun 1997/1998 yang melanda Indonesia, telah mengakibatkan krisis multidimensi, baik sosial, politik, dan budaya. Mengingat krisis multidimensi yang melanda Indonesia, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan sosial dalam rangka mengatasi masalah bangsa yang diakibatkan krisis ekonomi. Melalui Keputusan Presiden Nomor 190 Tahun 1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial (JPS), atas dasar pertimbangan bahwa dalam upaya mengatasi situasi yang timbul akibat krisis moneter yang berlangsung saat ini (Lestari, 2021), Jaring Pengaman Sosial (JPS) sangat penting artinya dalam mendukung dan mewujudkan proses pemberdayaan masyarakat. Program JPS, merupakan salah satu kebijakan sosial yang paling nyata dilihat sebagai wujud melaksanakan pembangunan sosial.

Secara sederhana, jika kita ingin memahami kebijakan sosial dalam kehidupan sehari-hari salah satunya dengan memperhatikan program-program pemberdayaan masyarakat, baik yang disponsori oleh pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun lembaga donor internasional. Misalnya, selain JPS ada juga Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang disponsori oleh Bank Dunia. Dalam artikelnya dalam majalah Prisma, Carroll (2010: 89) menuliskan bahwa pemerintah Indonesia menggambarkan PPK sebagai sebuah proyek yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan memperbaiki tata pemerintahan di tingkat lokal pedesaan Indonesia. Bagi Bank Dunia, yang menggolongkan PPK sebagai sebuah proyek pemberdayaan masyarakat atau perlindungan sosial, program itu digambarkan dalam makna yang lebih formal sebagai “perencanaan partisipatif dan pengelolaan pembangunan di pedesaan melalui program luas infrastruktur sosial ekonomi, (yang) juga akan

memperkuat institusi-institusi formal dan informal tingkat lokal melalui pelibatan lebih besar dan akuntabilitas kebutuhan dasar pembangunan.

Dari penjelasan di atas tergambar bahwa program PPK sebagai program yang disusun untuk meningkatkan kapasitas sosial ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai adalah membuka jalan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peluang-peluang ekonomi, pelayanan sosial, dan kebijakan sosial bagi penduduk di pedesaan. Upaya kesejahteraan sosial di dalam PPK terlihat dalam bentuk pemberian bantuan untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat desa, contohnya; jalan, gedung sekolah, pos kesehatan, dan sebagainya. Melalui mekanisme penguatan kapasitas institusi sosial penduduk desa, diharapkan rumusan dalam PPK bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat desa, sebab kebijakan sosial yang dibuat berdasarkan atas inisiasi penduduk desa secara partisipatif (Syafar, 2017). Dengan demikian, kebijakan sosial menitikberatkan pada peran intervensi sosial ekonomi secara kolektif baik oleh pemerintah maupun LSM dalam meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk.

Pada dasarnya, kebijakan sosial yang dibuat oleh pemerintah (Orde lama sampai orde reformasi) bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat. Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya struktural dan kultural. Keberadaan program JPS dan PPK dalam memberdayakan masyarakat dipengaruhi oleh faktor struktural, artinya masyarakat menjadi miskin karena; kehilangan pekerjaan, kekurangan pangan, tidak mampu sekolah dan berobat, diakibatkan oleh kebijakan dalam pembangunan yang salah. Hal ini disebabkan oleh pembangunan nasional hanya mengedepankan pembangunan ekonomi sehingga ketika ekonomi dunia mengalami penurunan (resesi), Indonesia terkena dampaknya. Sayangnya lagi, kebijakan sosial di Indonesia kurang mendapat perhatian, dan mengakibatkan krisis multi dimensi yang cukup hebat sampai ke daerah-daerah di Indonesia. Inilah pelajaran bagi bangsa Indonesia, ternyata mendistorsikan kebijakan sosial berakibat pada pengalaman sejarah yang pahit dan kelam, Indonesia kurang berpengalaman

dalam mengatasi masalah sosial akibat kebijakan ekonomi yang pernah mengguncang negara ini (Nurwati, 2008).

Dengan demikian, fokus pembangunan sosial adalah perubahan sosial yang direncanakan sejalan dengan pembangunan ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penekanan dalam konsep pembangunan sosial berfokus pada masyarakat yang lebih luas, dengan mengintegrasikan pengembangan ekonomi sebagai sebuah proses pembangunan yang komprehensif dan universal. Sehingga kebijakan-kebijakan atau program-program sosial ekonomi yang dibuat untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dibuat selama ini oleh negara perlu mendapatkan kritik yang dinamis dari para kelompok sasaran sebagai masyarakat yang menerima manfaat. Sehingga program yang tersebut dalam dievaluasi sebagai proyeksi dalam kebijakan sosial melalui program yang akan dibuat di masa depan (Syafar, 2016).

3. Pembangunan Berbasis Masyarakat yang Merupakan Salah Satu Pilihan dalam Kebijakan Pembangunan

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan pembangunan sosial sebagai strategi untuk mensukseskan pembangunan nasional. Pengalaman dari kegagalan negara mengesampingkan pembangunan sosial telah membuktikan betapa sulitnya membangun masyarakat yang berkeadilan sosial sesuai cita-cita bangsa. Indonesia masih dikatakan belum berhasil mencapai pembangunan nasional yang seutuhnya, jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam menghadapi krisis ekonomi yang lalu. Sebab dampak krisis masih terasa sampai sekarang, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sehingga dibutuhkan strategi dalam mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih berkeadilan. Ife & Tesoriero (2006: 409) mengemukakan bahwa tujuan dari pengembangan masyarakat adalah membangun kembali masyarakat

sebagai tempat pengalaman penting masalah manusia, memenuhi kebutuhan manusia, dan membangun kembali struktur-struktur negara kesejahteraan, ekonomi global, birokrasi, elite profesional, dan sebagainya yang kurang berprilaku manusiawi dan sulit di akses. Pembangunan sosial lebih memfokuskan diri pada masyarakat yang lebih luas. Tidak seperti pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial lainnya (seperti filantropi, pelayanan dan intervensi sosial, dan administrasi sosial), tetapi pembangunan sosial berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, melalui program pemberdayaan masyarakat. Program-program sosial ekonomi seperti JPS dan Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan bagian dari pembangunan sosial yang menyentuh semua warga negara dalam rangka menanggulangi kemiskinan di pedesaan maupun dipertanian yang di dalamnya terdapat upaya-upaya kesejahteraan.

Program IDT merupakan program yang dirancang oleh pemerintah sebagai proses pembangunan Indonesia menuju tahap lepas landas dalam Repelita VI. Seiring dengan itu, pemerintah membuat kebijakan untuk memberdayakan masyarakat miskin di pertanian maupun di pedesaan dalam menguatkan kapasitas sosial ekonominya. Masyarakat desa maupun Kota yang masuk dalam kategori tidak mampu (miskin) mendapatkan bantuan dari pemerintah sebagai modal untuk mengembangkan usaha sesuai bidang pekerjaan yang digelutinya. Pemerintah juga menyediakan pendamping bagi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program IDT, yang bertugas mendampingi dan ikut dalam proses belajar bersama masyarakat. Kehadiran para pendamping menjadi orang yang bisa mengarahkan kelompok sasaran untuk bisa mempergunakan bantuan dari pemerintah tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya dan tepat sasaran. Para pendamping juga memberikan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia sesuai dengan bidang yang digelutinya, pelatihan budidaya tanaman, peningkatan manajemen industri kecil dan menengah, dan sebagainya. Yang lebih penting lagi adalah pendamping bisa berintegrasi sosial dengan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan sosial, sehingga

program IDT mampu menguatkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat harus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan membuat setiap orang dalam masyarakat terlibat secara aktif dalam proses-proses dan kegiatan masyarakat, serta untuk menciptakan kembali masa depan masyarakat. Laksmono (1999: 11) dalam hasil penelitian disertasinya menjelaskan bahwa ada paradoks yang dihadapi dalam kemiskinan, yaitu: pertama, orang miskin adalah mereka yang membutuhkan bantuan namun mereka adalah kelompok yang justru menemui kesulitan dalam memperoleh bantuan yang diperlukannya. Kedua, diakui bahwa orang miskin adalah mereka yang paling banyak merasakan manfaat bantuan sekecil apapun dan mempunyai percepatan pemanfaatan yang relatif tinggi dibanding kelompok yang lebih kaya, namun mereka adalah yang paling sulit menjangkau sarana pembangunan yang ada. Ketiga, mereka yang paling membutuhkan, namun dalam perlakuan birokrasi mereka justru yang paling buruk mengalami perlakuan dalam proses distribusi sosial. Untuk itu, pemberdayaan masyarakat sebagai proses perubahan masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya, dalam konteks menyesuaikan dengan pembangunan yang dicita-citakan oleh bangsa menuju kesejahteraan sosial.

D. Penutup

Pembangunan sosial yang begitu kompleks dan dinamis, ternyata memiliki strategi dalam membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam membangun masyarakat, sebab dalam pemberdayaan tersebut keterlibatan (partisipasi) masyarakat menjadi prioritas dalam program kebijakan sosial. Untuk itu, dalam pembahasan sebelumnya dapat menarik kesimpulan: 1) Pembangunan nasional sebagai kemajuan negara adalah pembangunan yang berkeadilan sosial dimana mengedepankan berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Jadi, arah pembangunan

nasional pada dasarnya melibatkan seluruh aspek dalam sistem pembangunan, dan berjalan satu sama lain dengan mengedepankan masyarakat sebagai subyek pembangunan tersebut. Untuk itu, fokus pembangunan yang seutuhnya adalah pembangunan nasional yang berkeadilan sosial. 2) Penekanan dalam konsep pembangunan sosial berfokus pada masyarakat yang lebih luas, dengan mengintegrasikan pengembangan ekonomi sebagai sebuah proses pembangunan yang komprehensif dan universal. Sehingga kebijakan-kebijakan atau program-program sosial dan ekonomi yang dibuat untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat. 3) Pembangunan masyarakat merupakan pilihan dalam pembangunan sosial yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam membangun kembali kehidupannya sebagai tempat pengalaman penting masalah manusia, memenuhi kebutuhan manusia, dan membangun kembali struktur-struktur negara kesejahteraan, birokrasi, elite profesional, dan sebagainya yang kurang berprikemanusiaan dan sulit di akses. Pembangunan sosial lebih memfokuskan diri pada masyarakat yang lebih luas, sehingga partisipasi mereka merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*. CV Pustaka Setia.
- Carroll, T. (2010, July). Pembangunan Sosial sebagai ‘Kuda Troya’ Neoliberal: Bank Dunia dan Program Pengembangan Kecamatan di Indonesia. *Prisma*, 84–101.
- Huraerah, A. (2008). *PENGERGANSIASAN dan PENGEMBANGAN MASYARAKAT: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Humaniora. <https://books.google.co.id/books?id=nHO0DwAAQBAJ>
- Ife, J. W., & Tesoriero, F. (2006). *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation*. Pearson Australia.
- Laksmo, B. S. (1999). *Memahami Permasalahan Akses dalam Program Penanggulangan Kemiskinan: Kajian Dimensi Lembaga dalam Pelaksanaan Program IDT di Wilayah DKI Jakarta pada Tahun Pelaksanaan Pertama 1994-1995*. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Lestari, N. (2021). JARING PENGAMAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SLEMAN. *Ar-Riblab: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam*, 6(2), 1–19.
- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2). <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>
- Marsden, D. (1984). *Social Policy in the Third World: The Social Dilemmas of Underdevelopment*. JSTOR.
- Midgley, J. (2005). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare* (Khaeroni (ed.)). Ditperta Islam Departemen Agama RI. Jakarta.
- Mkandawire, T. (2004). *Social Policy in a Development Context*. United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) and Palgrave Macmillan.
- Mustikawati, I. S. (2017). Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun Studi Kualitatif pada Ibu-Ibu di Kampung Nelayan Muara Angke Jakarta Utara; Studi Kualitatif. *ARKESMAS (Arsip Kesehatan Masyarakat)*, 2(1), 115–125. <https://doi.org/10.22236/arkesmas.v2i1.514>
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 245387.
- Sajogyo, & Martowijoyo, S. (2005). *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Kancab Globalisasi*. Sajogyo Institut.

- Sumodiningrat, G. (1999). Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. In *Gramedia. Jakarta*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suwarsono, & So, A. Y. (1994). *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. LP3ES.
- Syafar, M. (2015). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan. *Lembaran Masyarakat*, 1(2), 125–154.
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/lbrmasy/article/view/572>
- Syafar, M. (2016). Kajian Pengembangan Desa Mandiri Energi. *Lembaran Masyarakat*, II(2), 27–56.
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/lbrmasy/article/view/524>
- Syafar, M. (2017). Modal Sosial Komunitas dalam Pembangunan Sosial. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 3(1), 1–22.
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/lbrmasy/article/view/530>
- Syofya, H. (2018). PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 177–185.
<https://doi.org/10.31849/jieb.v15i2.1153>

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Susunan Panitia	ii
Sepatah Kata Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam	iii
Sambutan Dekan Fakultas Dakwah	v
Pendahuluan: Memahami Pembangunan Berbasis Masyarakat	vii
Daftar Isi	xxiii
Pemberdayaan Anak Pemulung melalui Bimbingan Belajar dalam Program Pendidikan <i>Waste Solution Hub</i>	1
Siti Sukaesih, Fortuna Sayyidinaa, Kartini, Muhammad Ilham Kurniyawan, Indah Nurbayanti	
Pengembangan Inovasi dan Kreativitas bagi Anak-Anak di Masa Pandemi	21
Elsa Salsabila, Rizky Dita Sari, Dinda Dwiyana	
Pemberdayaan Masyarakat Desa Binaan Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (Laz Harfa) melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten	37
Dea Anjar Wati & Cicih Sarheti	
Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Community Led Total Sanitation oleh Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (Laz Harfa) di Kampung Cigalih Desa Kutamekar Pandeglang, Banten	59
Arini Sisi Nabillah & Hera Diana Tansia	
Pemberdayaan Ekonomi oleh Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (Laz Harfa) Di Desa Pasindangan, Banten	81
Yeni Dwi Al Fitri & Jihaan Alfiyah	
Penanggulangan Virus Covid-19 di Desa Sinarjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Banten	97
Ipah Ismayati & Meilinda Lestari	
Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Sarana Air Bersih (SAB) pada Desa Binaan Laz Harfa di Kampung Cimuncang, Desa Sudimanik, Kecamatan Cibaliung, Pandeglang-Banten	117
Cucun Sunariah & Eneng Reni	

Strategi Laz Harfa dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kesehatan: Pencegahan Covid-19 di Desa Ciodeng Kabupaten Pandeglang	133
Nadia Anggraini & Asri Juliawan	
Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatan Ekonomi dengan Budidaya Ikan di Desa Waringinjaya Kecamatan Cigeulis Pandeglang, Banten	151
Cathrine O. S. Putri & Reni Puspitasari	
Peran Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (Laz Harfa) dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hygiene Masyarakat Desa Bojongmanik, Kabupaten Pandeglang, Banten	169
Siti Nur Fadilah & Amelia Nur Aeni Hutasoit	
Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Oleh Lembaga Laz Harfa dalam Mewujudkan Desa Harapan di Desa Curug Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Banten	187
Sa'dullah K. Ikhwan & Husni Mubarak	
Program Pendampingan terhadap Potensi Santri Pondok Pesantren Riyadul Ibtida di Kampung Landeuh, Lebak-Banten	197
Siti Yhunis Arum, Siti Kholilah, Anas Nasrudin, Paisal Andriansah, Taufik Faturrohman	
Peran Rumah Edukasi dan Literasi Al-Qurán (Reliq) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Inovatif dan Bermanfaat Melalui Program Kawis (Kewirausahaan Sosial)	215
Arif Haeruddin, Anisa Nurul Hikmah, Yuheti Niawati, Muhamad Hamdan, Muhamad Sutarji	
Intervensi Sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jakarta Barat dalam Program Operasi Bantuan Pangan di Wilayah Kecamatan Cengkareng	239
Nizar Alwan & Cici Nur Syamsiah	
Efektivitas Pelaksanaan <i>Fun Learning</i> terhadap Gangguan Kecemasan Sosial Pada Anak Oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jakarta Barat	251
Tukfatul Anam & Teuku Raehan Revikhasyah	
Efektivitas Pelaksanaan Program Filantropi dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat	267
Avita Alini Putri & Tasya Ameliani	
Implementasi Filantropi Sosial melalui Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jakarta Barat di Kecamatan Kebon Jeruk	281
Nuraini Widad & Restiana	
Peran Aktif Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam Penerapan Altruisme melalui Global Wakaf di Kecamatan Kembangan dan Tambora, Jakarta	299
Tina Sagita Sari, Fikri Sabillah, Ibrahim Rasyid Zamzami	

**Implementasi Program Bantuan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Wilayah
Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat** 315

Muhamad Hapizd Kamaludin & Qurrota Ayuni Thahir

**Peran Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam Penyaluran Bantuan Sosial di
Wilayah Jatipulo, Jakarta Barat** 331

Ari Alfiansyah & Alwansyah Rifa'i

